

PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)

¹Ida Bagus Pujiswara,
¹Nyoman Trisna Herawati, ²Ni Kadek Sinarwati

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {gus_pujiswara@yahoo.co.id,aris_herawati@yahoo.co.id,
kadeksinar20@gmail.com}@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Penelitian ini mengambil lokasi di SKPD Kabupaten Klungkung. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang bekerja pada dinas-dinas di Kabupaten Klungkung. Sampel ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dari 90 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 88, dan yang dapat dianalisis sebanyak 82. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 19.00.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Keempat, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Kata kunci: akuntabilitas, pengawasan keuangan daerah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, nilai informasi pelaporan keuangan

Abstract

This study was aimed at finding out the effect of the use of region's financial accounting information system and region's financial control on the value of information in financial reports and region's government accountability.

This study took place in SKPDs in Klungkung regency. The respondents were accounting and finance division workers who worked in the offices in Klungkung regency. The sample was determined by purposive sampling technique. The type of data used was primary data. The method of data collection was questionnaire. From 90 questionnaires distributed, 88 were returned and the ones that could be analyzed was 82. The technique of data analysis was multiregression analysis using SPSS version 19.00.

The results showed that: First, the use of the region's financial accounting information system and the region's financial control had partially a positive effect on the value of information in the region's government financial reports. Second, the use of the region's financial accounting information system simultaneously had an effect on the value of information in the region's government financial reports. Third, the use of the region's financial accounting information system and the region's financial control had partially an effect on the region's government accountability. Forth, the use of the region's financial accounting information system and the region's financial control simultaneously had a positive effect on the region's government accountability.

Keywords: *accountability, region's financial control, region's financial accounting information, value of information in financial reports, accountability*

PENDAHULUAN

Pada organisasi sektor publik, masih banyak terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan informasi yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) semakin meningkat. Hal tersebut juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai. Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat jika informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Sehingga nilai

informasi merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Rendahnya kualitas informasi laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara maksimal dan pengawasan yang masih lemah. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu

mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan, dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan

informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007 dalam Afrianti 2011).

Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan upaya tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007 dalam Armando, 2013). Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Arfianti, 2011).

Jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salahsatu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadapkinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dengan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukannya. Selain itu pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan atau pungutan sumber dan publik dan tujuan penggunaannya (Husein, 2005 dalam Wulandari, 2009).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sehingga, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan yang disajikan oleh pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2012. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha segenap pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai informasi atas laporan keuangan

yang dihasilkan, yang ditempuh melalui beberapa cara, antara lain pemanfaatan teknologi informasi ke dalam proses pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang lebih intensif dari aparat pengawas fungsional daerah. Pemanfaatan serta integrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2010. Melalui pemanfaatan dan integrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang lebih efektif dan memadai serta peningkatan sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta menciptakan *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, (2) pengaruh pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, (3) pengaruh secara simultan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, (4) pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah, (5) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah, (6) pengaruh secara simultan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah.

METODE

Penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif, dimana penelitian asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara

dua variabel atau lebih, dan dalam hal ini hubungan tersebut bersifat kausal dimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Sugiyono, 2008). Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah yang merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dari variabel penelitian tersebut ditentukan indikator, instrumen penelitian dan desain sampel yang digunakan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung telah memanfaatkan serta mengintegrasikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2010. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi dan penatausahaan keuangan pada Dinas-Dinas yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung, sedangkan objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden. Teknik ini memberikan tanggung jawab bagi responden yang dijadikan subjek penelitian untuk memilih dan menjawab pertanyaan/pernyataan yang disediakan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada dinas-dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang berjumlah 1004 orang. Adapun Teknik pengambilan sampel terhadap responden dilakukan dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai bagian akuntansi dan keuangan, memiliki jenjang pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat, dan telah bekerja minimal 1 tahun. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 82 orang.

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), dan Wulandari (2009). Variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 5 poin. Kuesioner penelitian terdiri dari 4 instrumen. Instrumen pertama berisi pernyataan mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari 10 item pernyataan. Instrumen kedua berisi pernyataan mengenai pengawasan keuangan daerah yang terdiri dari 8 item pernyataan. Instrumen ketiga berisi pernyataan mengenai nilai informasi pelaporan keuangan yang terdiri dari 13 item pernyataan. Dan Instrumen keempat berisi pernyataan mengenai akuntabilitas pemerintah daerah yang terdiri dari 8 item pernyataan.

Data yang terkumpul terlebih dahulu diuji kualitas datanya dengan uji validitas dan reliabilitas. Suatu Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid (Ghozali, 2012). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2012).

Selanjutnya data diuji dengan menggunakan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), kemudian uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dan uji normalitas untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi normal. (Ghozali, 2012).

Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda ini diolah dengan menggunakan program *SPSS for windows versi 19*. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara serentak (uji F) serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada dinas-dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang telah memenuhi kriteria. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 90 eksemplar. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 88 eksemplar.

Dari jumlah kuesioner yang kembali, ditemukan sebanyak 6 kuesioner yang tidak dapat digunakan karena tidak lengkap, sehingga kuesioner tersebut dianggap gugur. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang dapat digunakan dan diolah lebih lanjut adalah sebanyak 82 kuesioner.

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir, dan lama bekerja di dinas. Pada penelitian ini jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau sebesar (56,1%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 36 orang atau (43,9%). Sementara responden yang memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SMA adalah sebanyak 30 orang atau (36,6%), D3 sebanyak 7 orang atau (8,5%), S1 sebanyak 40 orang atau (48,8%), dan 5 orang (6,1%) memiliki pendidikan terakhir S2. Selain itu, responden yang bekerja selama kisaran

waktu 1-5 tahun yaitu sebanyak 16 orang atau (19,5%) dan sebanyak 66 orang (80,5%) sudah bekerja di atas 5 tahun. Sehingga keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 82 orang.

Hasil uji validitas instrumen untuk masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal tersebut dilihat dari hasil pengujian "*Pearson Correlation*" yang menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($> 0,2172$) dan nilai probabilitas $< 0,05$.

Selanjutnya untuk hasil uji reliabilitas instrumen masing-masing variabel penelitian dinyatakan reliabel karena diperoleh nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$, yakni sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 0,850, pengawasan keuangan daerah sebesar 0,789, nilai informasi pelaporan keuangan sebesar 0,841, serta akuntabilitas pemerintah daerah sebesar 0,738, sehingga semua variabel dinyatakan reliabel.

Hasil pengujian normalitas pada masing-masing model regresi menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, yakni dari hasil pengujian normalitas regresi model 1 diperoleh nilai sig. sebesar 0,635, dan pada regresi model 2 diperoleh nilai sig. sebesar 0,120. Hal ini berarti semua data terdistribusi secara normal.

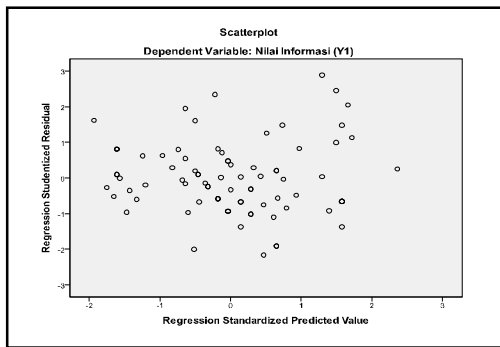
Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa masing-masing model regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas. Multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi yang bebas multikolinieritas dapat dilihat dari masing-masing nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai VIF untuk kedua model regresi, yakni nilai VIF sebesar 2,994 dan nilai *tolerance* sebesar 0,334.

Hasil uji Heteroskedastisitas melalui pengamatan pada grafik *scatterplot*, terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga

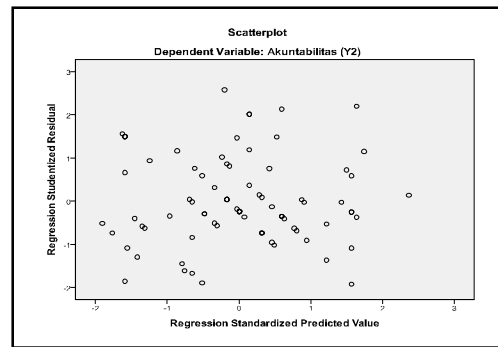
model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan layak digunakan. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan baik secara parsial melalui uji t, maupun secara simultan melalui uji F,

serta koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian secara parsial (uji t), dan pengujian secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.



Gambar 1.1. Scatterplot Model 1



Gambar 1.2. Scatterplot Model 2.

Tabel 1.1 Hasil Uji Regresi Berganda Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model 1	Koefisien	t	Sig. t
Konstanta	13,076		
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,488	6.578	0.000
Pengawasan Keuangan Daerah (X2)	0,632	6.617	0.000
R Square	= 0,857		
Adjusted R Square	= 0,853		
F	= 236,676		
Sig. F	= 0,000		

Sumber: data primer diolah, 2014.

Tabel 1.2 Hasil Uji Regresi Berganda Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Model	Koefisien	t	Sig. t
Konstanta	10,018		
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,335	5.303	0.000
Pengawasan Keuangan Daerah (X2)	0,267	3.289	0.002
R Square	= 0,719		
Adjusted R Square	= 0,712		
F	= 100,911		
Sig. F	= 0,000		

Sumber: data primer diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 13,076 + 0,488 X_1 + 0,632 X_2 + \varepsilon$$

Selanjutnya berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 10,018 + 0,355 X_1 + 0,267 X_2 + \varepsilon$$

Hasil uji koefisien determinasi untuk kedua variabel bebas terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah terlihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,853, yang mengandung arti bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah sebesar 85,3%. Sedangkan sisanya 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi untuk kedua variabel bebas terhadap akuntabilitas pemerintah daerah terlihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,712, yang mengandung arti bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah sebesar 71,2%. Sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,578 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan

dengan manfaat dari suatu teknologi sistem informasi dalam suatu organisasi, dan bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian, serta penyiapan laporan keuangan lebih tepat waktu sehingga dapat meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan dan mampu untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar 6,617 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Dengan adanya pengawasan yang efektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka pelaporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban

pemerintah mampu memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, sistem pemerintahan akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, dan untuk mendukung kualitas dan laporan keuangan yang baik, perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001). Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Gerry Armando (2013), bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji F pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis H_3 melalui F_{test} terlihat bahwa F_{hitung} sebesar 236,676 dan nilai probabilitas 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua

telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi nilai informasi yang diharapkan dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. Selain itu, pengawasan keuangan daerah yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan memiliki nilai informasi, maka pengawasan yang efektif telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten klungkung, baik melalui pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasanlangsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat. Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Safrida Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar (2010) dan Gerry Armando (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa variabel pemanfa atan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5.303 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Klungkung yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke

tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks, pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan keakuratan dan kecepatan dalam pemrosesan data keuangan, serta penyampaian informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Selain itu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga akan meningkatkan akuntabilitas proses, dimana akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi (Ellwood, 1993 dalam Mardiasmo, 2002). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji t pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,289 dan nilai probabilitas sebesar 0,002. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salahsatu cara pemerintah daerah kabupaten klungkung untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan

Aparat Pengawas Internal Pemerintah dilakukan secara berkesinambungan. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang baik dan efektif maka akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) dapat terpenuhi. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik (Ellwood, 1993 dalam Mardiasmo, 2002) Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Indah Wulandari (2009), bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji F pada tabel 1.2, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis H_6 melalui F_{test} terlihat bahwa F_{hitung} sebesar 100,911 dan nilai probabilitas 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klungkung sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan

pemerintah sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak kehilangan nilai informasi serta meningkatkan kualitas informasi yang disalurkan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka sistem pengendalian internal dapat meningkatkan terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irman Firmansyah (2008) dan Indah Wulandari (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.

Kedua, pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin baik dan efektif pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.

Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keempat, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat.

Kelima, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat.

Keenam, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah khususnya satuan kerja perangkat daerah kabupaten klungkung adalah: (1) untuk pemerintah daerah Kabupaten Klungkung sebaiknya memperhatikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah, karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan memperhatikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah, (2) untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel dependen lain yang terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah seperti transparansi pelaporan keuangan, (3) untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode *survey* berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiyanti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi,

- Universitas Semarang, Diponegoro, _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Armando, Gery. 2008. *Pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)*. Artikel. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Firmansyah, Imam. 2008. *Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survai pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan VI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV.Afabeta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Winidyaningrum, Celviana & Rahmawati. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
- Wulandari, Indah. 2009. *Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam Menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintahan Kota padang*. Artikel. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Yuliani, Safrida., Nadirsyah dan Usman Bakar. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2. Juli 2010 Hal. 206-220.